

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa pembentukan produk hukum daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;</p> <p>c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>	<p>a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan upaya sistematis, terencana dan terpadu serta prosedural dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan yang berdasarkan pada asas pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat;</p> <p>c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>

	<p>Perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 5. Bupati adalah Bupati Demak. 6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 8. Badan pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak. 11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) diubah sebagai berikut:</p>

<ol style="list-style-type: none"> 12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 13. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati. 14. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. 15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD. 16. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 17. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 18. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 19. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah. 	
--	--

<p>22. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.</p> <p>23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>24. Nomor register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.</p> <p>25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.</p> <p>26. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.</p> <p>27. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Demak.</p> <p>28. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Demak.</p> <p>29. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan rancangan perda.</p> <p>30. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.</p> <p>31. Hari adalah hari kerja.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 2</p> <p>Produk Hukum Daerah berbentuk:</p> <p>a. peraturan; dan</p> <p>b. penetapan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	

<p>Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perda; b. Peraturan Bupati; dan c. Peraturan DPRD. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keputusan Bupati; b. keputusan DPRD; c. keputusan Pimpinan DPRD; dan d. keputusan Badan Kehormatan DPRD. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. penetapan; dan/atau e. Pengundangan. <p>(2) Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan ayat (2) Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	

<p>(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <p>(2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan Daerah; b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah; c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Pasal 8</p> <p>Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan Propemperda; b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 9</p> <p>Bupati menugaskan pimpinan PD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD yang membidangi hukum. (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kewenangan, materi muatan atau kebutuhan. 	

<p>(3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PD yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Tata Cara Penyusunan Propemperda</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh PD yang membidangi hukum.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan Daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah. <p>(5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun</p>	

<p>dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.</p> <p>(3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD. <p>(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan PD yang membidangi hukum; dan d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penataan kecamatan; dan b. penataan desa. 	

<p>(2) Perencanaan Penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati.</p> <p>(2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penambahan Rancangan Perda; dan/atau b. penghapusan Rancangan Perda. <p>(3) Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal terjadi usulan pembahasan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).</p> <p>(4) Penghapusan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau c. adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari Pembentukan Perda. <p>(5) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 17</p>	

<p>(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.</p> <p>(3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati atau keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda Pasal 18</p> <p>(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda. (2) Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.</p>	<p>2. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, 18B, dan 18C sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>(1) Penyusunan Rancangan Perda dapat menggunakan metode omnibus.</p> <p>(2) Penggunaan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dalam Propemperda.</p> <p>(3) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan peraturan perundangundangan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau

	<p>c. mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 18B</p> <p>Materi muatan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 18C</p> <p>(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>(2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.</p> <p>(5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.</p> <p>(6) Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Pasal 19</p>	

<p>(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan PD, mengikutsertakan PD yang membidangi hukum</p> <p>(3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p> <p>(4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.</p> <p>(5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.</p> <p>(6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.</p> <p>(7) Apabila diperlukan, PD yang membidangi hukum dapat memfasilitasi PD pemrakarsa dalam penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(8) Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; <p>hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) PD yang membidangi hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari PD pemrakarsa.</p> <p>(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.</p> <p>(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>(4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan PD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.</p> <p>(5) Keikutsertaan PD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.</p> <p>(6) PD yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada PD pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bupati memerintahkan PD pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.</p> <p>(2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p> <p>(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p>	

<p>a. Bupati; b. Sekretaris Daerah; c. PD pemrakarsa; d. PD yang membidangi hukum; e. PD terkait; dan f. perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh PD pemrakarsa.</p> <p>(6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan PD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan PD pemrakarsa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Sekretaris daerah menugaskan kepala PD yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p> <p>(2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan PD yang membidangi hukum berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Sekretaris daerah menugaskan kepala PD yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p> <p>(2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan PD yang membidangi hukum berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada PD pemrakarsa dan pimpinan PD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.</p> <p>(2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.</p>	

<p>(3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Pasal 28</p> <p>(1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.</p> <p>(2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, maka DPRD dapat membentuk panitia khusus.</p> <p>(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; b. daftar nama; dan c. tanda tangan pengusul. <p>(3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 	

<p>d. jangkauan dan arah pengaturan (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:</p> <p>a. APBD; b. pencabutan perda; atau c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; penyampaian rancangan perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda. (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada pimpinan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam rapat paripurna DPRD.</p>	

<p>(2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. <p>(4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan <p>(5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.</p> <p>(6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pasal 36</p>	

<p>(1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p> <p>(2) Pimpinan PD pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada PD yang membidangi hukum untuk dilakukan pembahasan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 37</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.</p> <p>(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.</p> <p>(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.</p> <p>(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peraturan DPRD tentang tata tertib; b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.</p> <p>(2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 42</p> <p>Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keputusan Bupati; b. keputusan DPRD; c. keputusan pimpinan DPRD; dan d. keputusan badan kehormatan DPRD 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan Keputusan Bupati Pasal 43</p> <p>(1) Pimpinan PD menyusun rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.</p> <p>(2) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan PD yang membidangi hukum.</p>	

<p>(3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan DPRD Pasal 44</p> <p>(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD. (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD. (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan: a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD; b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD. (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 46</p>	

<p>(1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pasal 48</p> <p>(1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.</p> <p>(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang</p>	

dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.</p> <p>(3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu</p> <p>Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda Pasal 51 Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, PD pemrakarsa atau PD yang membidangi hukum memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda. <p>(2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundangundangan, pembahasan</p>	

<p>rancangan perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.</p> <p>(3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.</p> <p>(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) meliputi:</p> <p>a. dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda; 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi. <p>b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda; 2) pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. <p>c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) meliputi:</p>	

<p>a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna <p>b. pendapat akhir Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan. (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Dalam hal pembahasan Rancangan perda tertentu tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Bupati dapat membentuk tim pembahasan lanjutan Rancangan perda untuk melakukan pembahasan Rancangan perda di DPRD pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Rancangan perda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rancangan perda mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. tata ruang Daerah; d. rencana pembangunan industri; dan e. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kelurahan. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pasal 65</p> <p>(1) Pembahasan rancangan peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan PD pemrakarsa.</p> <p>(2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Bupati diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 66</p> <p>(1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.</p> <p>(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.</p> <p>(3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus. <p>(2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. <p>(3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan Pasal 68</p> <p>(1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh PD pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh PD yang membidangi hukum.</p> <p>(2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p style="text-align: center;">BAB VII FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Fasilitasi Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 70</p> <p>(1) Setiap Rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.</p> <p>(2) Setiap rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.</p> <p>(3) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.</p> <p>(4) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan Evaluasi.</p> <p>(5) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Perda Pasal 72</p> <p>(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari sejak disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati untuk dilakukan evaluasi yang mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RPJPD; b. RPJMD; 	

<p>c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>d. pajak daerah;</p> <p>e. retribusi daerah;</p> <p>f. tata ruang daerah;</p> <p>g. rencana pembangunan industri Daerah; dan</p> <p>h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.</p> <p>(2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII NOMOR REGISTER Bagian Kesatu Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang Dievaluasi Pasal 74</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan wajib mendapatkan Nomor Register dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Nomor Register belum dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Pasal 75</p> <p>(1) Rancangan perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p>	

<p>(2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg, terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.</p> <p>(3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.</p> <p>(5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Perda Pasal 77</p> <p>Rancangan perda yang telah mendapatkan Noreg dilakukan penetapan dan pengundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan oleh Bupati.</p>	

<p>(2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.</p> <p>(3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Penandatanganan perda dibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DPRD; b. Sekretaris Daerah; c. PD yang membidangi hukum berupa minute; dan d. PD pemrakarsa. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Peraturan Bupati Pasal 80</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.</p> <p>(2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara, atau Penjabat Bupati.</p> <p>(4) Penjabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru</p>	

<p>saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga). (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; b. PD yang membidangi hukum berupa minute; dan c. PD pemrakarsa. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Peraturan DPRD Pasal 82</p> <p>(1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sekretaris daerah; b. sekretaris DPRD; c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan d. PD yang membidangi hukum. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Keputusan Bupati Pasal 84</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.</p>	

<p>(2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(3) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wakil Bupati; b. Sekretaris Daerah; dan c. Pimpinan PD. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; b. PD yang membidangi hukum berupa minute; dan c. PD pemrakarsa. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p>Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan 	

<p>b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.</p> <p>(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).</p> <p>(3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan DPRD; b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan c. sekretaris DPRD. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penomoran Pasal 89</p> <p>(1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perda, peraturan Bupati, keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala PD yang membidangi hukum; dan b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD. <p>(2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.</p> <p>(3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengundangan Pasal 90</p> <p>(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.</p> <p>(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.</p>	

<p>(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ketentuan lain di dalam Perda yang bersangkutan.</p> <p>(5) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.</p> <p>(2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.</p> <p>(3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.</p> <p>(4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Peraturan Bupati dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.</p> <p>(2) Peraturan Bupati dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Sekretaris daerah mengundang perda, peraturan Bupati dan peraturan DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan perda, peraturan Bupati dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, pejabat sementara atau pelaksana harian sekretaris daerah.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>Perda, peraturan Bupati dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Autentifikasi Pasal 95</p> <p>(1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.</p> <p>(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala PD yang membidangi hukum untuk perda, peraturan Bupati dan keputusan Bupati; dan b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh PD yang membidangi hukum dengan PD pemrakarsa.</p> <p>(2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X PENYEBARLUASAN Pasal 97</p> <p>(1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan Rancangan perda.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p>	

<p>(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p> <p>(2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan PD pemrakarsa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.</p> <p>(2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan PD pemrakarsa.</p> <p>(3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 101</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan perda, Peraturan Bupati dan/atau peraturan DPRD.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. rapat dengar pendapat umum;</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak</p>

<p>b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat</p> <p>(5) Pemerintah daerah memfasilitasi dalam kemudahan masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi, situs web, atau infrastruktur teknologi informasi.</p>	<p>langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <p>a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.</p> <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(8) Pembentuk Produk Hukum Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	<p>6. Di antara BAB XI dan BAB XII ditambahkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB XIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
	<p>7. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101A</p> <p>(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>

	<p>(2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PD yang membidangi hukum.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah; b. meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah; c. melakukan evaluasi terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah; d. menghindari potensi munculnya uji materi atau gugatan terhadap Produk Hukum Daerah; dan e. melaksanakan program dan kegiatan lainnya agar pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui PD yang membidangi hukum melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum di lingkungan PD dan Pemerintah Desa.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 102</p> <p>Semua pembiayaan dalam pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 103</p> <p>(1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.</p>	

<p>(2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.</p> <p>(3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. <p>(4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perda, peraturan Bupati, keputusan Bupati oleh PD yang membidangi hukum; dan b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Perda, peraturan bupati, dan keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.</p> <p>(2) Penulisan nama Provinsi Jawa tengah dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Setiap tahapan pembentukan perda, peraturan Bupati, dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, peraturan Bupati, dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan analis hukum, jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan, analis legislatif dan tenaga ahli.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 106</p>	

<p>(1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.</p> <p>(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah daerah provinsi.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah yang sedang berjalan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);</p> <p>b. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 4);</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	

Pasal 110	Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.
Ditetapkan di Demak pada tanggal 11 Januari 2021 Plh. BUPATI DEMAK, ttd JOKO SUTANTO	Ditetapkan di Demak pada tanggal 21 Juli 2023 BUPATI DEMAK, ttd EISTI' ANAH
Diundangkan di Demak pada tanggal 11 Januari 2021	Diundangkan di Demak pada tanggal 21 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 1	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 9